

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia penegakkan hukum, Advokat memiliki atau memegang peranan penting untuk menjamin terciptanya atau terlaksanaka suatu keadilan bagi seluruh masyarakat dan dalam proses berjalannya dinamika hukum di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa Advokat adalah salah satu dari catur wangsa penegak hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama. Catur wangsa penegak hukum antara lain advokat, polisi, jaksa dan hakim.

Sebagai salah satu dari catur wangsa tersebut, profesi Advokat mendapat dan memegang peran sebagai profesi yang terhormat (*Officium Nobile*) dan diberikan hak imunitas kepadanya dalam menjalankan profesinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa :

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan “

Dalam perjalanan pekerjaannya, profesi Advokat kerap kali mendapat diskriminalisasi karena hak imunitas dinilai hanya melindungi Advokat ketika menjalankan tugas profesinya di dalam sidang pengadilan. Maka dari itu banyak praktisi hukum mengambil langkah melakukan *judicial review* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan membuahkan hasil berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 bahwa :

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Secara historis fungsi utama *Contempt of Court* sebagai pranata hukum adalah untuk melindungi wibawa dan martabat Hakim dari suatu sikap, tindak dari siapa saja termasuk Advokat selama persidangan. Dalam praktek di lapangan, secara nyata banyak ditemui kasus Advokat yang ketika menjalankan tugas profesinya melakukan reaksi yang dianggap tidak sopan di dalam persidangan tetapi masih dianggap wajar karena dalam rangka membela kepentingan klien oleh Advokat. *Contempt of court* adalah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.¹

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki hukum, dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Badan peradilan sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan supremasi hukum sebagai sarana penegakkan hukum yang adil bagi setiap orang yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Segala sesuatu yang dicita-citakan, yang dibayangkan tentang hukum diharapkan dalam kenyataannya penegakkan hukum dapat memenuhi harapan setiap orang yang ada di negara ini. Badan peradilan harus menjadi benteng terakhir untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya agar masih ada rasa hormat dan rasa percaya terhadap badan peradilan.

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514052dfdcf3b/definisi-contempt-of-court> , diakses 26 September 2018 pukul 19.47.

Dalam dinamika perkembangan akhir-akhir ini terdapat fenomena yang dapat mereduksi martabat, keluhuran dan wibawa lembaga peradilan beserta aparaturnya, terutama harkat dan martabat hakim. Sikap dan tindakan yang ditampilkan oleh pencari keadilan, terutama advokat ditenggarai dapat dikategorisasikan mencederai martabat, keluhuran dan wibawa peradilan, baik sikap dan tindakan yang ditujukan terhadap proses peradilan, putusan pengadilan, terutama pejabat peradilan, dalam hal ini adalah hakim. Upaya yang dilakukan oleh seorang Advokat dalam membela serta memperjuangkan hak-hak dari klien kadang dinilai terlalu berlebihan serta dipandang bertentangan dari kaca mata penegak hukum lainnya. Upaya yang dilakukan oleh seorang Advokat dalam membela kepentingan kliennya juga terkadang dinilai bersifat menghalang-halangi proses penegakkan hukum.

Di Indonesia saat ini setidaknya ada 2 induk organisasi yang diakui yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Beberapa organisasi profesi Advokat dituntut untuk berperan aktif tidak hanya dalam upaya advokasi ketika terjadi kriminalisasi terhadap anggota organisasi tetapi juga pembinaan anggota organisasi sejak tahap pendidikan profesi Advokat sehingga para Advokat akan selalu mengingat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas serta kode etik profesi sebagai pedoman bertutur kata, bersikap dan bertindak serta meminimalisir kesalahan seminim-minimnya ketika sedang berpraktik di lapangan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT TERKAIT DENGAN CONTEMPT OF COURT DALAM PERADILAN INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa batasan/ukuran seorang Advokat melakukan *contempt of court* menurut ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Advokat terkait dengan *contempt of court* dalam peradilan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk :

1. Mengetahui batasan/ukuran seorang Advokat melakukan *contempt of court* menurut ketentuan yang berlaku dan
2. Pertanggungjawaban Advokat terkait dengan *contempt of court* dalam peradilan Indonesia.

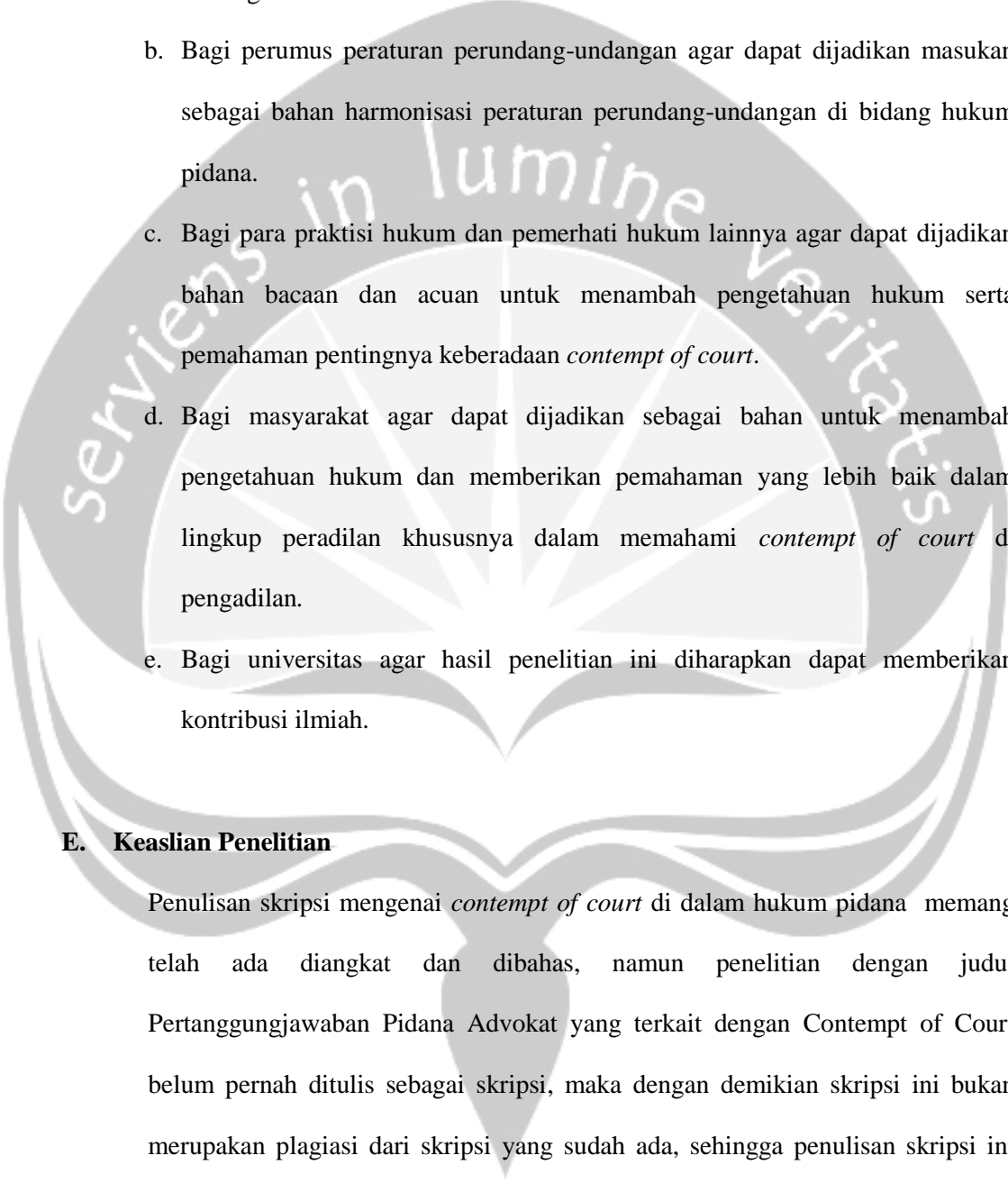
D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum pidana, khususnya sebagai bahan harmonisasi peradilan pidana.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- 
- a. Bagi penulis dalam menambah wawasan dan menjadi wadah bagi penulis untuk berkarya, melatih keterampilan dan melakukan penelitian untuk dituangkan kedalam sebuah tulisan ilmiah.
 - b. Bagi perumus peraturan perundang-undangan agar dapat dijadikan masukan sebagai bahan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
 - c. Bagi para praktisi hukum dan pemerhati hukum lainnya agar dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan untuk menambah pengetahuan hukum serta pemahaman pentingnya keberadaan *contempt of court*.
 - d. Bagi masyarakat agar dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik dalam lingkup peradilan khususnya dalam memahami *contempt of court* di pengadilan.
 - e. Bagi universitas agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi mengenai *contempt of court* di dalam hukum pidana memang telah ada diangkat dan dibahas, namun penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Advokat yang terkait dengan Contempt of Court belum pernah ditulis sebagai skripsi, maka dengan demikian skripsi ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang sudah ada, sehingga penulisan skripsi ini merupakan karya asli penulis serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun akademik.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban (pidana) adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.²
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.³
3. *Contempt of Court* adalah suatu perbuatan yang dipandang memperlakukan, menghalangi atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya.⁴
4. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.⁵
5. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.⁶ Peraturan yang digunakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Advokat terkait dengan *contempt of court* dalam peradilan Indonesia.

²<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf> , diakses pada 26 September 2018 pukul 20.15.

³ [www.academia.edu/16083005/Kamus Hukum Terlengkap - 11.000 istilah bahasa Inggris and Belanda](http://www.academia.edu/16083005/Kamus_Hukum_Terlengkap_-_11.000_istilah_bahasa_Ingggris_and_Belanda) , diakses pada 14 Desember 2018 pukul 02.04

⁴ e-journal.uajy.ac.id/2888/2/1HK09012.pdf , diakses pada 26 September 2018 pukul 20.24.

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-16, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Kode Etik Advokat Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Literatur-literatur yang memuat teori dan pendapat hukum ahli hukum atau opini sarjana hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014 *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Kencana, Jakarta, hlm. 182.

2) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum yang ada kaitannya dengan tema yang diteliti.

3) Narasumber yang diwawancarai yaitu Thomas Nur Ana Edi Darma, S.H.,M.H berprofesi sebagai Advokat sekaligus Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBKH) Pandawa Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penulisan ini, penulis menggunakan cara studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Mengumpulkan data sekunder dalam penulisan ini, penulis juga menggunakan wawancara dengan narasumber sebagai cara tambahan untuk menguatkan penulisan hukum penulis. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian dari seseorang ahli, profesional atau pejabat berwenang yang

berkapasitas atau berkompeten. Penulis mewawancarai Thomas Nur Ana Edi Darma, S.H., M.H seorang Advokat dan juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pandawa Yogyakarta.

4. Analisis Data

a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, akan dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- 1) Metode sistemasi hukum positif yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan disusun secara sistematis, setelah itu diurutkan berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Deskripsi peraturan perundang-undangan hukum positif yaitu memaparkan Pasal-Pasal atau aturan-aturan sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer yaitu penjelasan terhadap substansi hukum-hukum positif
- 3) Interpretasi hukum positif untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari.⁸
- 4) Analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dapat diperbandingkan guna mengetahui latar belakang terjadinya perbedaan aturan yang ada.
- 5) Menilai hukum positif yaitu menilai peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu tentang pertanggung jawaban Advokat terkait dengan *Contempt of Court* dalam Peradilan Indonesia

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis

⁸Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX Nopember – Desember, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 6.

- c. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperbandingkan , dan dicari ada tidaknya kesenjangan guna untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan penulis adalah secara deduktif. Proses berpikir digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.⁹ Dalam hal ini berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Pidana Advokat terkait dengan *Contempt of Court* dalam Peradilan Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/ variabel pertama, konsep/ variabel kedua, dan hasil penelitian yang harus konsisten dan harus sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

⁹ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Cet-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.